

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BUMDES STUDI KASUS DI DESA SEI SEMBILANG KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR

Siti Zahra Siagian¹, Putri Permata Assiddiq Harahap², Julia Ivanna³
sitizahrasiagian@gmail.com¹, putrypermaataa@gmail.com², juliaivanna@unimed.ac.id³
Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes cukup tinggi, terutama dalam keikutsertaan mereka pada rapat dan musyawarah desa. Pengurus BUMDes juga berasal dari unsur masyarakat, bukan dari perangkat desa. Namun, partisipasi tersebut belum diiringi dengan kesadaran yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program BUMDes. Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat pengembalian pinjaman oleh masyarakat dalam program simpan pinjam, serta kegagalan program kelompok tani akibat kurangnya perawatan terhadap ternak. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formal dan belum menyentuh partisipasi substantif. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif melalui peningkatan kapasitas masyarakat, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pengawasan yang berbasis partisipatif guna mendukung kelangsungan usaha desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Desa, Simpan Pinjam.

Abstract: This study aims to determine the extent of community participation in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sei Sembilang Village, Sei Kepayang Timur District, Asahan Regency. The approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that structurally, community involvement in the management of BUMDes is quite high, especially in their participation in village meetings and deliberations. BUMDes administrators also come from community elements, not from village officials. However, this participation has not been accompanied by an awareness of responsibility for the sustainability of the BUMDes program. The main problems that arise are the low level of loan repayment by the community in the savings and loan program, as well as the failure of the farmer group program due to lack of livestock care. This shows that community participation is still formal and has not touched on substantive participation. For this reason, a more intensive approach is needed through increasing community capacity, ongoing socialization, and participatory-based supervision to support the sustainability of village businesses independently and sustainably.

Keywords: BUMDes, Community Participation, Village Management, Savings and Loans.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan elemen penting dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memperkuat ekonomi desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Secara hukum, pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa BUMDes adalah entitas usaha desa yang memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum, yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa.

Keberadaan BUMDes tidak hanya dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga menjadi wahana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. BUMDes dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan prinsip partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan usaha desa (Kemendesa PDTT, 2020). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi aspek vital yang menentukan keberhasilan dan kesinambungan pengelolaan BUMDes.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud bukan hanya sebatas kehadiran fisik dalam kegiatan BUMDes, tetapi keterlibatan aktif dan kesadaran terhadap peran serta tanggung jawab dalam mengelola potensi ekonomi desa. Nurcholis (2011) menyatakan bahwa partisipasi yang efektif ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya peran mereka. Artinya, keberhasilan lembaga ekonomi pedesaan seperti BUMDes akan sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat yang substantif, bukan sekedar formalitas administratif saja.

Namun dalam realitasnya, partisipasi struktural masyarakat belum tentu sejalan dengan partisipasi yang bermakna dan sadar. Fenomena ini terlihat jelas di Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, yang memiliki BUMDes dengan tiga unit usaha utama: simpan pinjam, kelompok tani (yang mengelola program ternak kambing), dan usaha jasa. Secara kelembagaan, pengurus BUMDes berasal dari unsur masyarakat, bukan dari perangkat desa, dan masyarakat pun rutin mengikuti musyawarah terkait program-program BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sei Sembilang, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang memanfaatkan pinjaman dari unit simpan pinjam untuk membuka usaha namun tidak melakukan pengembalian sesuai perjanjian. Pada sektor kelompok tani, bantuan kambing sebagai modal usaha tidak dikelola secara serius sehingga banyak ternak yang mati dan menyebabkan program tidak berlanjut karena dana menjadi macet. Masalah ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab bersama dalam mengelola usaha desa masih rendah. Padahal, kesadaran kolektif merupakan landasan penting bagi keberhasilan perencanaan desa (Putri & Yani, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara menyeluruh realitas sosial, dinamika partisipasi, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola BUMDes sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal (Creswell, 2017).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Sei Sembilang, karena desa ini memiliki struktur BUMDes yang masih berjalan, dengan unit usaha seperti simpan pinjam, jasa, dan kelompok tani (peternakan kambing). Meskipun secara formal partisipasi masyarakat terlihat dalam kehadiran rapat dan pelaksanaan kegiatan, namun terdapat tantangan berupa rendahnya tanggung jawab kolektif, seperti kredit yang tidak dilunasi atau kelalaian dalam program ternak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan dalam menggali informasi, khususnya mengenai bentuk partisipasi, hambatan sosial, dan hubungan antara masyarakat dengan pengurus BUMDes. Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas masyarakat yang terkait dengan kegiatan BUMDes, termasuk partisipasi dalam musyawarah desa dan pengelolaan unit usaha. Teknik observasi digunakan untuk menangkap situasi sosial secara kontekstual dan mendukung temuan dari hasil wawancara. Dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan rapat, serta laporan informal dari pengurus BUMDes digunakan untuk melengkapi informasi dari dua teknik sebelumnya.

Data yang diperoleh dianalisis dengan mengikuti tahapan analisis kualitatif menurut Creswell (2017), yaitu: reduksi data (memilah dan menyaring data yang relevan), penyajian data (menyusun informasi dalam bentuk naratif deskriptif), dan penarikan kesimpulan (menginterpretasi temuan untuk menemukan pola atau tema utama yang berkaitan dengan partisipasi dan kesadaran masyarakat).

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data, guna meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian (Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap Peran dan Fungsi BUMDes di Desa Sei Sembilang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Sembilang telah terbentuk dan memiliki tiga unit usaha utama, yaitu kelompok tani (dengan program ternak kambing), simpan pinjam, dan jasa (yang masih berada dalam lingkup kegiatan simpan pinjam). Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pengurus yang berasal dari masyarakat dan juga melibatkan perangkat desa, sehingga secara struktural, terdapat hubungan langsung antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Pemerintah desa memahami bahwa BUMDes merupakan alat untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui usaha-usaha produktif masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial (pelayanan publik) dan lembaga ekonomi (komersial) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa Sei Sembilang memberi dukungan dalam bentuk pelibatan perangkat desa dalam pengelolaan serta musyawarah desa terkait program BUMDes. Di sisi lain, masyarakat juga terlibat

dalam pengelolaan dan kegiatan BUMDes, termasuk menghadiri rapat dan mengikuti program yang ditawarkan. Secara partisipatif, masyarakat tampak aktif dalam forum-forum BUMDes, yang menunjukkan adanya pemahaman dasar mengenai pentingnya keberadaan BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa. Namun, tingkat partisipasi ini belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman dan kesadaran yang bertanggung jawab terhadap fungsi BUMDes. Misalnya, pada unit simpan pinjam, banyak masyarakat yang menggunakan dana pinjaman untuk membuka usaha, tetapi tidak mengembalikannya sesuai kesepakatan. Ini menyebabkan dana tidak dapat berputar dan kegiatan usaha menjadi stagnan. Pada unit kelompok tani, bantuan berupa ternak kambing tidak dikelola dengan baik sehingga banyak kambing yang mati dan program tidak berlanjut. Akibatnya, dana yang digunakan pun tidak bisa dikembangkan kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa BUMDes bukan hanya sekadar tempat menerima bantuan atau pinjaman, melainkan lembaga usaha milik desa yang menuntut tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan keberlanjutannya. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2023), partisipasi masyarakat dalam BUMDes harus bersifat substantif, tidak hanya formal, agar keberadaan BUMDes dapat menjadi pendorong ekonomi yang berkelanjutan di desa. Pemahaman yang terbatas dari masyarakat ini juga menjadi penyebab utama dari berbagai kendala dalam pengelolaan BUMDes di Sei Sembilang. Tantangan terbesar bukan pada struktur kelembagaan atau dukungan pemerintah desa, melainkan pada rendahnya kesadaran kolektif masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap usaha bersama. Hal ini selaras dengan temuan dari Nugroho & Ayuningtyas (2022) yang menyatakan bahwa kegagalan BUMDes umumnya disebabkan oleh rendahnya partisipasi sadar masyarakat serta lemahnya tanggung jawab dalam pengelolaan modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah memahami dan melaksanakan fungsinya dalam mendukung BUMDes, termasuk melalui pelibatan perangkat desa dalam kepengurusan. Partisipasi masyarakat juga tampak aktif secara formal. Namun, pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BUMDes masih belum mencapai tingkat kesadaran kolektif yang memadai, sehingga menghambat usaha yang dijalankan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta pelaksanaan khususnya program simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Program simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes di desa ini menjadi salah satu bentuk usaha yang cukup diminati oleh masyarakat. Banyak warga yang memanfaatkan program ini untuk keperluan modal usaha ataupun kebutuhan lainnya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa antusiasme masyarakat untuk meminjam dana cukup tinggi. Namun sayangnya, semangat tersebut belum disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab, karena masih banyak peminjam yang tidak mengembalikan dana sesuai waktu yang ditentukan. Akibatnya, dana bergulir menjadi terhambat dan berdampak pada keberlangsungan program itu sendiri.

Padahal, pengelolaan BUMDes sudah melibatkan masyarakat secara langsung. Pengurus BUMDes berasal dari masyarakat, bukan dari perangkat desa, dan warga juga aktif mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pengelolaan usaha desa. Ini menunjukkan bahwa secara struktural dan administratif, masyarakat memiliki ruang partisipasi yang cukup besar. Namun demikian, pada tataran pelaksanaan program simpan pinjam, partisipasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam sikap bertanggung jawab sebagai peminjam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas pada

keterlibatan formal, belum sampai pada partisipasi substantif yang mencerminkan rasa memiliki dan komitmen terhadap keberlanjutan usaha milik desa. Yusran (2022) bahwa meskipun program simpan pinjam dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai modal usaha, terdapat kendala berupa minimnya kesadaran untuk membayar tagihan bulanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disosialisasikan oleh pengelola BUMDes maupun pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga berdampak pada minimnya pemanfaatan program BUMDes tersebut. Selain itu, hubungan kerjasama antara masyarakat dengan pengelola BUMDes dan pemerintah desa tidak berjalan secara optimal, sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat dapat memanfaatkan dan meningkatkan peran aktif dalam kegiatan program BUMDes tersebut.

Tantangan dan Upaya dalam pengelolaan bumdes

Pengelolaan BUMDes di desa ini sering menghadapi rintangan yang berasal dari alam dalam dan luar. berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat mengungkapkan bahwa masalah yang paling mendesak adalah kurangnya kesadaran di antara warga tentang keterlibatan aktif dan bertanggung jawab mereka dalam melaksanakan program BUMdes, terutama dalam aspek simpan pinjaman. Banyak warga didesa ini mencari dana dari BUMdes dengan alasan ingin membuka usaha, namun ketika waktu pembayaran tiba, mereka menunjukkan kurangnya akuntabilitas yang mencolok. Akibatnya, dana bergulir yang seharusnya digunakan masyarakat kembali oleh masyarakat lain malah menjadi terhenti.

Selain itu, program-program yang ditujukan untuk memelihara peternakan kambing di antara kelompok petani juga menghadapi keterbatasan yang signifikan. Sejumlah kambing yang mengganggu telah tewas, menandakan kekurangan dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan inisiatif. Hal ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan program jauh dari optimal, tidak memiliki kerangka kerja pemantauan yang kuat baik dari komunitas maupun administrator BUMdes. Selain itu, kelangkaan sumber daya keuangan menghadirkan tantangan lain, karena ketidakmampuan untuk memulihkan dana dari pinjaman sebelumnya menghambat kapasitas BUMDES untuk mengejar usaha ekonomi lebih lanjut. Kenyataannya, struktur manajemen BUMDes di desa ini terstruktur dengan terpuji, dengan para pemimpin muncul dari struktur masyarakat, yang secara teratur berkumpul dan terlibat dalam dialog. Namun, keterlibatan ini belum sepenuhnya terwujud sebagai akuntabilitas sosial dan ekonomi terhadap inisiatif BUMDes yang berkelanjutan. Intinya, keterlibatan masyarakat sebagian besar masih formal gagal menembus lapisan kesadaran yang lebih dalam sebagai ekonomi aktif di dalam desa.

Program yang dilakukan sejauh ini tetap terbatas pada partisipasi masyarakat dalam pertemuan dan pembentukan kerangka tata kelola oleh penduduk desa sendiri. Namun demikian, untuk secara efektif mengatasi masalah mendasar kesadaran rendah, tindakan strategis seperti meningkatkan keterampilan masyarakat melalui lokakarya manajemen keuangan, menerapkan pengawasan yang dipimpin masyarakat, dan menegakkan hukuman sosial atau administratif pada warga negara yang gagal membayar pinjaman sangat penting. Selain itu, pendekatan yang lebih kuat untuk sosialisasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan sangat penting bagi individu untuk merangkul tanggung jawab atas umur panjang BUMDes.

Astuti (2022) sejumlah besar BUMdes bersaing dengan berbagai tantangan yang dapat bertindak sebagai penghalang bagi manajemen yang efektif, termasuk keterlibatan masyarakat minimal, modal terbatas, dan kelangkaan inovasi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempercepat evolusi BUMdes menuju keadaan pertumbuhan dan kemajuan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan memperkuat kemampuan manajemen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sei Sembilang, terlihat bahwa kehadiran BUMdes sebagai entitas ekonomi desa dari masyarakat maupun pemerintah desa. Kepemimpinan BUMdes dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, masyarakat secara resmi berpartisipasi dalam diskusi dan inisiatif terkait dengan program BUMdes. Namun demikian, partisipasi ini belum sepenuhnya mewujudkan masyarakat dalam pengelolaan Bumdes dalam program simpan pinjam, di mana banyak orang mengambil pinjaman tetapi gagal untuk menegakkan tugas pembayaran mereka. Akibatnya, aliran dana menjadi terganggu, menghambat program berfungsi sebagaimana dimaksud.

Demikian pula, program seputar kelompok pertanian, terutama upaya penggembalaan kambing, goyah karena perhatian dan pengawasan yang tidak memadai, yang menyebabkan hilangnya ternak yang signifikan. Skenario ini menyoroti kekurangan dalam akuntabilitas dan tata kelola teknis dalam lingkup komunitas. Sementara itu, pemerintah desa memang telah memberikan dukungan kepada BUMdes, baik melalui keterlibatan aparat desa maupun program penjangkauan. Namun, pemahaman masyarakat yang terbatas tentang pentingnya keberlanjutan dan akuntabilitas bersama tetap menjadi penghalang tangguh bagi pengelolaan holistik BUMdes.

Untuk mengatasi rintangan ini, upaya yang lebih terpadu sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui literasi keuangan, lokakarya manajemen kewirausahaan, dan pengawasan yang berakar pada keterlibatan masyarakat. Strategi sosial dan budaya juga penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan di antara warga terhadap BUMdes sebagai aset kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. Y., Tamala, Y. F., & Mafruhah, A. Y. (2022). Tantangan dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDes Menuju Status Berkembang dan Maju di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 127-142.
- Creswell, J. W. (2017). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum BUMDes*.
- Nugroho, A., & Ayuningtyas, D. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan BUMDes. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 6(2), 115–124.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes.
- Putri, L., & Yani, R. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 122–131.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yusran. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 11(1), 124-137